

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Globalisasi menghilangkan batas-batas dalam semua aktivitas kehidupan saat ini tidak terkecuali perdagangan internasional. Perdagangan antar negara menemukan kemudahan dalam bertransaksi saat ini yang disebut dengan era *trade liberalization*. *Trade liberalization* adalah kegiatan perdagangan internasional yang menghapus hambatan tarif dan non-tarif sehingga membuka kesempatan berkompetisi yang lebih besar (Acharya, 2015:393). Prinsip dalam sistem perdagangan internasional saat ini diatur oleh *World Trade Organization* (WTO). Meskipun sistem perdagangan internasional saat ini mengedepankan penghapusan hambatan tarif dan non-tarif, dalam prakteknya negara-negara masih dapat melakukan praktik curang atau *unfair trade*. Negara yang mengalami kerugian atas tindakan curang negara lain dapat menggunakan instrumen *trade remedies* antara lain anti-dumping terhadap tindakan dumping yang menjual harga barang di bawah nilai normal, anti-subsidi terhadap pemberian subsidi, dan *safeguard* sebagai tindakan pengamanan untuk industri dalam negeri atas lonjakan impor (United States Trade Representative, n.d.).

India merupakan salah satu negara yang menggunakan instrumen *trade remedies* dalam perdagangan internasionalnya. Beberapa produsen benang India mengajukan permasalahan mereka atas kerugian industri domestik yang diakibatkan oleh tindakan dumping dari negara-negara eksportir. Kerugian ini menyebabkan para

produsen meminta pemerintah India untuk mengambil kebijakan anti-dumping terhadap produk impor benang poliester atau *Polyester Spun Yarn* (PSY) (Fibre Fashion, 2020)<sup>1</sup>. India menyikapi kerugian ini dengan menggunakan instrumen *trade remedies* yaitu menginisiasi penyelidikan anti-dumping terhadap produk PSY dengan *Harmonized System* (HS) 5509.21.00 dari sejumlah negara seperti Vietnam, Tiongkok, Nepal, dan Indonesia (Kementerian Perdagangan, 2022).

Berdasarkan keputusan tersebut, India memberi tuduhan anti-dumping ke beberapa negara pengekspor PSY salah satunya adalah Indonesia. Atas tuduhan anti-dumping ini, India akan melakukan penyelidikan kepada perusahaan dari negara tertuduh dan jika terbukti benar maka diberlakukan bea masuk anti-dumping. Hal ini berpotensi menurunkan ekspor produk PSY Indonesia ke India hingga menyebabkan kerugian perekonomian nasional karena termasuk komoditas ekspor yang berpengaruh. Produk PSY termasuk jenis ekspor non migas yang mana jenis tersebut memiliki nilai ekspor yang tinggi. Ekspor non migas memiliki pengaruh yang cukup besar dalam perekonomian Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan nilai ekspor non migas yang lebih tinggi daripada migas berdasarkan tabel berikut:

---

<sup>1</sup> Fibre2Fashion merupakan portal pasar digital yang mendukung dan melayani produk tekstil sejak tahun 2000.

**Tabel 1.1**

**Nilai Ekspor Migas dan Non Migas 2019 - 2021**

Komponen Ekspor	Nilai Ekspor (Juta US\$)		
	2019	2020	2021
Migas	11.789,3	8.251,1	12.247,4
Non Migas	155.893,7	154.940,7	219.362,1
Jumlah	167.683,0	163.191,8	231.609,5

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2019-2021, diolah.

Tabel di atas menunjukkan bahwa nilai ekspor non migas lebih tinggi daripada migas. PSY merupakan hasil produk tekstil. Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) merupakan jenis non migas dan termasuk dalam 10 produk unggulan Indonesia (Kemendag, 2022). Industri TPT meliputi produksi serat, benang, kain, hingga pakaian jadi. Sebagai salah satu produk utama Indonesia, produk tekstil memiliki peran penting dalam menopang perekonomian nasional. Industri produk ini melakukan penyerapan tenaga kerja sebesar 6,38 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) industri pengolahan non migas (Kemenperin, 2022). Dijelaskan oleh Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang, bahwa industri TPT masih menjadi komoditas ekspor andalan Indonesia yang mencapai nilai ekspor hingga USD 6,08 miliar atau berkontribusi sebanyak 5,51 persen dari total ekspor nasional pada Juni 2022 (Kemenperin, 2022).

Berdasarkan tuduhan dari India tersebut, maka Indonesia perlu melakukan upaya pembelaan demi melindungi kinerja ekspor produk PSY ke India. Berangkat dari permasalahan tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti bagaimana upaya Indonesia menghadapi tuduhan dumping yang mengancam ekspor produk PSY dalam kegiatan perdagangan internasional dengan India.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan: “Bagaimana upaya diplomasi Indonesia dalam menghadapi tuduhan dumping atas produk PSY oleh India?”

## **1.3 Tujuan**

Penelitian ini memiliki dua tujuan, yakni tujuan umum dan khusus:

### **1.3.1 Tujuan Umum**

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana upaya diplomasi dalam melindungi kegiatan ekspor suatu negara.

### **1.3.2 Tujuan Khusus**

Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan upaya diplomasi yang dilakukan oleh Indonesia dalam menghadapi penyelidikan anti-dumping oleh negara lain terhadap produk ekspor.

## **1.4 Manfaat**

Penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat diantaranya sebagai berikut:

### **1.4.1 Teoritis**

Penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis berupa pemahaman yang mendalam pada studi Hubungan Internasional mengenai diplomasi yang digunakan dalam membela produk ekspor suatu negara dari penyelidikan anti-dumping yang berpotensi menjadi hambatan dagang dalam perdagangan internasional.

### **1.4.2 Praktis**

Penelitian ini nantinya diharapkan mampu memberikan manfaat bagi para praktisi terkait yaitu pemerintah dan eksportir mengenai upaya yang dapat dilakukan dalam menghadapi permasalahan dagang antar negara.

## **1.5 Kerangka Teori**

Penulis mengambil beberapa contoh penelitian terdahulu sebagai pembanding penelitian yang akan penulis teliti. Telah banyak peneliti yang membahas upaya Indonesia dalam menghadapi tuduhan dumping tuduhan dumping yang dihadapi Indonesia. Dari perspektif hukum, Indonesia melakukan upaya berupa tuntutan kepada negara seperti Korea Selatan dan Uni Eropa melalui WTO atas tuduhan dumping (Nawiyah et al., 2023; Meliyani, 2019; Siregar & Nst, 2023). Penelitian oleh Nawiyah et al. (2023) membahas pengaruh tuntutan terhadap tuduhan dumping dari Korea Selatan atas produk kertas yang dianalisis menggunakan konsep dumping dan

perdagangan internasional. Penelitian oleh Meliyani (2019) berusaha menemukan penyebab ketidakpastian retaliasi Indonesia terhadap Korea Selatan dan mencari solusinya dari sisi kepastian hukum. Masih dalam lingkup tuduhan dumping, upaya Indonesia dalam menghadapi tuduhan dumping dari Uni Eropa terhadap produk biodiesel diteliti menggunakan konsep kerjasama internasional dan keunggulan komparatif yang menghasilkan upaya Indonesia mengadukan kasus ini ke WTO (Siregar & Nst, 2023). Namun ketiga penelitian ini tidak menggunakan teori yang sesuai dengan perspektif hukum dalam membahas tuntutan tersebut sehingga para peneliti mendeskripsikan kasus yang terjadi menggunakan konsep perdagangan internasional.

Terdapat penelitian yang membahas tentang upaya diplomasi Indonesia dalam menghadapi tuduhan dumping dari negara lain. Iswardhana (2017) meneliti strategi apa saja yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dumping kertas dengan Korea Selatan, menggunakan teori *linkage* dan diplomasi perdagangan sebagai kerangka berpikir. Hasil yang didapat adalah Indonesia melakukan diplomasi bilateral berupa penggunaan strategi *linkage* yang melibatkan aktor-aktor non-negara dalam memberi penekanan kepada Korea Selatan. Penelitian yang kedua yaitu Islamiati (2021) menggunakan konsep diplomasi dalam menganalisa upaya Indonesia menghadapi tuduhan dumping kertas fotocopy A4 oleh Australia, kemudian menggunakan teori perdagangan internasional dan konsep dumping untuk menjelaskan tuduhan dumping. Hasil penelitian ini adalah Indonesia melakukan diplomasi yang berkoordinasi dengan para *stake holder* dan pemerintah Australia,

mengajukan gugatan atas tuduhan dumping kertas ke WTO, mengirimkan surat resmi kepada pemerintah Australia, dan membuat kerangka kerjasama komprehensif antara Indonesia dan Australia. Namun kedua penelitian tersebut tidak memiliki sudut pandang teori yang dapat menjelaskan bentuk sikap Indonesia dalam menghadapi tuduhan dumping. Dengan demikian, kelima penelitian di atas belum menggunakan teori yang mampu menganalisis sikap Indonesia terhadap tuduhan dumping sehingga menghasilkan upaya yang dilakukan baik berupa tuntutan maupun diplomasi. Teori dalam penelitian dapat dijadikan pedoman untuk memprediksi fakta, sedangkan kelima penelitian tersebut belum menggunakan teori yang dapat mendasari analisis Indonesia akan menghasilkan upaya berupa tuntutan atau diplomasi dalam menghadapi tuduhan.

Oleh karena itu, peneliti merasa penelitian tentang upaya Indonesia dalam menghadapi tuduhan dumping produk PSY oleh India menggunakan kacamata neoliberalisme dapat menjadi celah yang menarik yang kemudian dielaborasi dengan konsep diplomasi ekonomi. Sudut pandang teori neoliberalisme akan mampu membingkai sikap kerjasama Indonesia dalam fenomena pasar bebas ini yang dapat memperkuat analisis dengan sikap Indonesia yang kooperatif menghasilkan upaya diplomasi. Kacamata neoliberalisme ini akan membantu untuk menjelaskan sikap Indonesia yang juga merupakan anggota WTO dalam menyikapi permasalahan perdagangan internasional sehingga dapat memperkuat analisis upaya Indonesia dalam menghadapi tuduhan dumping dengan konsep diplomasi ekonomi.

### 1.5.1 Neoliberalisme

Salah satu teori dalam hubungan internasional yang dapat menjadi alat analisis perdagangan internasional adalah neoliberalisme. Neoliberalisme adalah teori praktik politik dan ekonomi dan seperangkat kebijakan ekonomi yang telah tersebar luas dalam 30 hingga 40 tahun terakhir di internasional (Abramovitz, 2014). Neoliberalisme yang pada awalnya merupakan teori praktik ekonomi politik, mengusulkan bahwa kesejahteraan manusia dapat ditingkatkan dengan cara terbaik melalui kebebasan kewirausahaan individu dan keterampilan dalam kerangka kelembagaan atau institusi yang dicirikan oleh hak kepemilikan pribadi yang kuat, pasar bebas, dan perdagangan bebas (Harvey, 2005: 2). Menurut Harman (2008), neoliberalisme berarti “liberalism baru” yang mana liberalisme berarti pasar bebas. Dengan demikian, ini adalah kebangkitan ideologi ekonomi ortodoks "*laissez faire*" yang berlaku sampai kemerosotan besar tahun 1930-an.

Teori neoliberalisme dalam perkembangannya dapat digunakan untuk mempelajari organisasi internasional dan kerjasama internasional. Dalam sistem internasional, neoliberalisme tidak menyangkal bahwa itu bersifat anarki. Neoliberalisme justru yakin dengan sistem anarki tersebut maka dibutuhkan adanya kerjasama untuk mengatasi hambatan-hambatan sehingga muncul interdependensi (Lamy, 2008).

Salah satu kemunculan interdependensi yang dimaksud yaitu di bidang perdagangan internasional. Neoliberalisme mempunyai ciri khas gagasan yang lebih menekankan pada deregulasi pasar, privatisasi badan usaha milik negara, campur

tangan pemerintah yang terbatas, serta pasar internasional yang lebih terbuka (Harvey, 2005:3). Hal ini paling sering dikaitkan dengan program penyesuaian struktural yang diberikan oleh *World Bank*, *International Monetary Fund*, dan *World Trade Organization* (Abramovitz, 2014: 225). Neoliberalisme memiliki proyek untuk memudahkan perdagangan antar negara agar sumber daya dapat bergerak lebih mudah, cepat, dan murah. Cara untuk neoliberalisme mencapai tujuan tersebut yaitu melalui menghilangkan sesuatu yang menghalangi pasar bebas, seperti Hambatan Teknis Perdagangan dan Hambatan Tarif.

Institusi memiliki peranan penting dalam teori ini, namun negara masih memiliki peranan yaitu untuk menciptakan dan melestarikan kerangka kelembagaan sesuai dengan praktiknya (Harvey, 2005:2). Berdasarkan pernyataan Harvey tersebut, maka negara dapat melakukan praktik pasar bebas yang diatur oleh WTO termasuk cara menyelesaikan masalah dalam perdagangan internasional. Cara menyelesaikan masalah dalam perdagangan internasional dapat dilakukan dengan kerjasama antar negara yang di dalamnya terdapat praktik diplomasi, dalam hal ini diplomasi ekonomi.

### 1.5.2 Diplomasi Ekonomi

Diplomasi dapat menjadi salah satu cara yang dilakukan untuk mencapai kepentingan nasional suatu negara dalam berhubungan dengan negara lain. Diplomasi dapat mempengaruhi negara lain untuk melakukan tindakan yang dapat menguntungkan negara. Menurut pendekatan tradisional, diplomasi berarti seni bernegosiasi antarnegara namun seiring berkembangnya zaman diplomasi tidak lagi

terbatas antara aktor negara melainkan terdapat aktor non negara dalam hubungan internasional (Barston, 1997: 1). Diplomasi yang bersifat tradisional yaitu hubungan diplomatik yang dijalankan oleh diplomat sebagai perwakilan negara. Definisi diplomasi dalam buku *Guide to Diplomatic Practice* oleh Sir Earnest Satow yaitu pengaplikasian dari kepandaian dan taktik pada hubungan antar negara yang berdaulat (dalam Study of Global Politics, 2012). Fungsi dan peran diplomat dalam diatur dalam Pasal 3 *Vienna Convention of Diplomatic Relations* 1961 antara lain mewakili negeri pengirim di negara penerima; melindungi kepentingan dan warga negara dari negara pengirim di negara penerima; melakukan kesepakatan dengan pemerintah negara penerima; memberi laporan mengenai perkembangan di bidang ekonomi, militer, ilmu pengetahuan, dan bidang lain di negara penerima; dan meningkatkan kerjasama dengan negara penerima dalam berbagai bidang.

Berbeda dengan diplomasi tradisional, praktik diplomasi modern tidak terbatas pada fungsi diplomat. Diplomasi ekonomi termasuk dalam jenis diplomasi modern. Diplomasi ekonomi menggabungkan konsep ekonomi dan diplomasi, hasil keduanya mencakup keterampilan komunikasi dan negosiasi internasional dengan tujuan melindungi dan mempromosikan kepentingan ekonomi (Žirovčić, 2016:1). Menurut Rana (2007:1), diplomasi ekonomi adalah proses di mana negara-negara menangani dunia luar, untuk memaksimalkan keuntungan nasional mereka di semua bidang kegiatan, termasuk perdagangan, investasi dan bentuk pertukaran lain yang menguntungkan secara ekonomi, kegiatan ini memiliki dimensi bilateral, regional dan multilateral yang masing-masing penting. Cara memaksimalkan keuntungan ekonomi

tidak lagi melalui monopoli entitas negara, melainkan dapat melalui agen resmi asing dan kementerian ekonomi, layanan diplomatik dan komersial, ditambah promosi lembaga ekonomi yang terlibat dalam kemitraan dinamis dengan berbagai aktor non-negara.

Rana (2007: 2-6) memaparkan lima kunci indikator dalam kesuksesan diplomasi ekonomi. Indikator yang pertama yaitu keterlibatan ekonomi di luar negeri yang melibatkan lebih dari kementerian luar negeri, ekonomi, dan industri, melainkan unit bisnis, asosiasi industri dan cabang ekonomi seperti sektor finansial, pariwisata, investasi, dan aktor domestik lainnya yang menjadi pemangku kepentingan. Kedua struktur kementerian luar negeri dan manajemen ekonomi perlu untuk terintegrasi dan harmonis. Ketiga, memprioritaskan promosi ekspor dan mobilisasi investasi luar negeri dalam diplomasi ekonomi. Keempat, memiliki regulasi yang dipertanggungjawabkan oleh pemerintah yang bertujuan untuk menciptakan kondisi yang memajukan perdagangan dan investasi. Indikator terakhir yaitu optimalisasi jaringan diplomatik.

Guna mempermudah pembaca dalam memahami penjelasan mengenai penelitian tersebut, penulis menguraikan skema alur pemikiran dengan bagan berikut ini:

Gambar 1.1

Bagan Skema Alur Pemikiran



## 1.6 Operasionalisasi Konsep

### 1.6.1 Definisi Konseptual

Berdasarkan definisi para ahli di bagian kerangka pemikiran, maka definisi konseptual diturunkan sebagai berikut:

#### 1.6.1.1 Pasar Bebas

Definisi pasar bebas dalam neoliberalisme menurut Harvey (2005) adalah aktivitas yang pasar internasional yang lebih terbuka dengan sedikit campur tangan pemerintah. Dalam pasar bebas peran institusi sangat penting institusi, namun masih membutuhkan peran dari negara untuk melestarikan kerangka kelembagaan dalam praktik pasar bebas yang adil dengan menghilangkan hambatan. Dengan demikian pasar bebas merupakan kondisi pasar internasional yang lebih terbuka diatur oleh institusi dengan bantuan peran negara untuk mencapai tujuan pasar yang bebas dari hambatan dalam praktiknya.

#### 16.1.2 Kerjasama Internasional

Kerjasama dalam pandangan neoliberalisme dibutuhkan meskipun tidak menyangkal bahwa sistem internasional bersifat anarki. Hal ini merujuk pada kutipan oleh Lamy (2008) bahwa neoliberalisme justru yakin dengan sistem anarki tersebut maka dibutuhkan adanya kerjasama untuk mengatasi hambatan-hambatan sehingga muncul interdependensi. Begitupula dalam perdagangan internasional, institusi internasional dan negara dapat bekerjasama untuk mengatasi hambatan perdagangan karena adanya rasa saling membutuhkan untuk menghindari hambatan pasar bebas.

#### 1.6.1.3 Diplomasi Ekonomi

Menurut Rana (2007:1), diplomasi ekonomi adalah proses di mana negara-negara menangani dunia luar, untuk memaksimalkan keuntungan nasional mereka di semua bidang kegiatan, termasuk perdagangan, investasi dan bentuk pertukaran lain

yang menguntungkan secara ekonomi, kegiatan ini memiliki dimensi bilateral, regional dan multilateral yang masing-masing penting. Dengan demikian konsep diplomasi ekonomi merupakan suatu proses di mana suatu negara beraktivitas di luar negeri untuk memaksimalkan keuntungan di bidang ekonomi.

## 1.6.2 Definisi Operasional

### 1.6.2.1 Pasar Bebas

Konsep pasar bebas pada penelitian ini didefinisikan sebagai kondisi perdagangan internasional antara Indonesia dan India yang merupakan anggota WTO berupaya menghindari hambatan dagang dari adanya praktik dumping dan tuduhan anti-dumping. WTO sebagai institusi internasional yang mengatur perdagangan internasional membutuhkan peran negara dari Indonesia dan India dalam mengikuti prosedur selama penyelidikan dumping agar menghindari hambatan dagang berupa bea masuk. Konsep pasar bebas pada penelitian ini ditekankan untuk menganalisis peran Indonesia sebagai negara tertuduh dalam proses tuduhan dumping yang telah diatur oleh WTO.

### 1.6.2.2 Kerjasama Internasional

Konsep kerjasama internasional dalam penelitian ini didefinisikan sebagai kondisi bagaimana Indonesia menyikapi adanya tuduhan dumping produk PSY oleh India yang dapat berujung terhadap pengenaan bea masuk. Dengan bekerjasama, Indonesia dapat menghindari pengenaan bea masuk. Kerjasama yang dapat dilakukan oleh Indonesia yaitu dalam bentuk mengikuti prosedur penyelidikan dumping yang

telah diatur oleh WTO. Dalam prosedurnya, jika Indonesia tidak bersifat kooperatif maka langsung dikenakan bea masuk oleh India.

### 1.6.2.3 Diplomasi Ekonomi

Dalam penelitian ini, upaya Indonesia dalam menghadapi tuduhan dumping dianalisis menggunakan konsep diplomasi ekonomi yang dijelaskan oleh Rana (2005). Konsep diplomasi dalam penelitian ini akan menganalisis bagaimana upaya Indonesia dalam beraktivitas di luar negeri menghadapi tuduhan dumping produk PSY oleh India yang bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan di bidang ekonomi khususnya perdagangan. Dalam menganalisis upaya diplomasi Indonesia menggunakan 5 indikator diplomasi ekonomi. Indikator yang pertama yaitu keterlibatan ekonomi di luar negeri yang melibatkan lebih dari kementerian luar negeri, ekonomi, dan industri, melainkan unit bisnis, asosiasi industri dan cabang ekonomi seperti sektor finansial, pariwisata, investasi, dan aktor domestik lainnya yang menjadi pemangku kepentingan. Kedua struktur kementerian luar negeri dan manajemen ekonomi perlu untuk terintegrasi dan harmonis. Ketiga, memprioritaskan promosi ekspor dan mobilisasi investasi luar negeri dalam diplomasi ekonomi. Keempat, memiliki regulasi yang dipertanggungjawabkan oleh pemerintah yang bertujuan untuk menciptakan kondisi yang memajukan perdagangan dan investasi. Indikator terakhir yaitu optimalisasi jaringan diplomatik.

## **1.7 Argumen Penelitian**

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, dan kerangka pemikiran yang mendasari (Teori Neoliberalisme dan Konsep Diplomasi Ekonomi), maka argumen penelitian ini adalah: Indonesia menghadapi tuduhan dumping produk PSY oleh India secara kooperatif melalui upaya diplomasi ekonomi. Upaya diplomasi ekonomi ini merupakan bentuk implementasi dari neoliberalisme dalam pasar bebas yang bertujuan menghilangkan hambatan tarif.

## **1.8 Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode bersifat kualitatif. Menurut Strauss dan Corbin (dalam Creswell, 1998: 24), jenis penelitian kualitatif menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat diperoleh menggunakan perhitungan statistik atau pengukuran. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang sifatnya umum terhadap kenyataan sosial dari perspektif partisipan, pemahaman ini didapat setelah melakukan analisis (Rahmat, 2009: 3). Penggunaan metode penelitian kualitatif akan membantu penulis memahami fenomena untuk menjawab rumusan masalah.

### **1.8.1 Tipe Penelitian**

Pada penelitian kualitatif terdapat tipe penelitian deskriptif. Tipe penelitian ini membuat peneliti dapat melakukan prediksi menggunakan analisis hipotesis terhadap variabel-variabel yang terlibat dalam hubungan tingkat korelatif (Nugrahani, 2014: 31). Penelitian tipe deskriptif kerap digunakan dalam penelitian bidang-bidang sosial dan

humaniora (Nugrahani, 2014: 32), sehingga penulis akan menggunakan metode penelitian bersifat kualitatif secara deskriptif untuk menggambarkan fenomena upaya diplomasi ekonomi yang dilakukan Indonesia dalam menghadapi tuduhan dumping produk PSY oleh India.

### 1.8.2 Situs Penelitian

Situs atau lokasi penelitian dapat dimanfaatkan dalam penelitian untuk mendapatkan data. Peristiwa yang terjadi di lokasi penelitian dapat ditarik kesimpulan secara kritis yang berkaitan dengan masalah penelitian (Nugrahani, 2014: 112). Dalam penelitian ini penulis menetapkan situs penelitian di wilayah Indonesia. Hal ini mengingat fenomena yang diteliti yaitu upaya diplomasi ekonomi Indonesia dalam menghadapi tuduhan dumping produk PSY oleh India.

### 1.8.3 Subjek Penelitian

Dalam menentukan subjek penelitian perlu memperhatikan pertimbangan berikut (Nugrahani, 2014: 62):

1. Subjek penelitian merupakan pihak yang telah bersangkutan cukup lama dan insentif dengan bidang yang dikaji.
2. Subjek penelitian merupakan pihak yang memiliki keterlibatan secara penuh dalam bidang tersebut.
3. Subjek penelitian memiliki kesediaan waktu yang cukup agar dapat memberikan informasi kepada peneliti.

Subjek pada penelitian ini adalah aktor negara dan non negara yang terlibat dari kegiatan ekspor produk PSY dari Indonesia ke India.

#### 1.8.4 Jenis Data

Menurut Nugrahani (2014: 107), jenis data untuk penelitian kualitatif merupakan data lunak yang berupa kata, kalimat, ungkapan, dan tindakan yang penting sekali untuk dicatat. Berdasarkan pengertian tersebut maka jenis data pada penelitian ini berupa data non numerik.

#### 1.8.5 Sumber Data

Data pada penelitian ini nantinya akan diperoleh dari sumber data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan dari narasumber yang menjadi sumber asli atau pertama dan tidak didapatkan dari dokumen (Narimawati, 2008:98), maka data primer didapatkan secara langsung. Sedangkan data sekunder merupakan data yang tidak langsung berupa dokumen-dokumen yang dikumpulkan (Nugrahani, 2014: 63). Data sekunder mendukung data primer yang didapatkan peneliti. Pada penelitian ini peneliti akan melakukan wawancara dengan narasumber terkait yaitu Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Data yang didapatkan dari wawancara tersebut akan didukung dengan data sekunder berupa studi kepustakaan dari jurnal, situs daring resmi pemerintah, dan *website* yang relevan.

#### 1.8.6 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis berusaha menjawab rumusan masalah berupa pertanyaan “bagaimana”, sehingga penulis akan menganalisis data yang dikumpulkan

untuk dapat menjelaskan fenomena dalam penelitian ini. Menurut Nugrahani (2014: 89), penelitian kualitatif merujuk pada teknik analisis data yang non-matematis menghasilkan temuan melalui data yang dikumpulkan dengan beberapa cara seperti wawancara, observasi, dokumentasi atau arsip, dan tes. Dengan data yang ada kemudian dikaitkan dengan sudut pandang konsep yang digunakan pada penelitian ini. Data berusaha didapatkan dengan cara wawancara dan analisis dokumen. Wawancara sendiri merupakan bentuk pengumpulan data secara interaktif, sedangkan analisis dokumen merupakan teknik non interaktif (LeComte dalam Sutopo, 2002: 58).

#### 1.8.7 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan serangkaian proses menyaring, menafsirkan, dan menyajikan data untuk membangun sebuah argument (Rosyidin, 2019:61). Argumen dalam penelitian membutuhkan bukti pendukung yang disebut dengan data berupa fakta. Data yang didapatkan pada penelitian ini nantinya dianalisis menggunakan teknik analisis kongruen. Teknik analisis kongruen dilakukan dengan peneliti fokus pada variabel penjelas dari teori yang digunakan sebagai filter data (Rosyidin, 2019:61).